



## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

Widya Yektining Darmastuti<sup>1</sup>, Endah Susilowati<sup>2\*</sup>, Oryza Tannar<sup>3</sup>

### AFILIASI:

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

### \*KORESPONDENSI:

endahs.ak@upnjatim.ac.id

### THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: 10.32534/jpk.v9i1.1913

### CITATION:

Darmastuti, W., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2019. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1-13.

### ARTICLE HISTORY

**Artikel Masuk:**  
19 Juni 2021

**Di Review:**  
11 Juli 2021

**Diterima:**  
8 Maret 2022

### Abstrak

Belanja modal mampu membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pengelolaan dan pelaksanaan belanja modal pada pemerintah daerah masih belum optimal. Pemerintah pusat telah menetapkan target perkiraan alokasi belanja kebutuhan pemerintah daerah sebesar 30 persen dari anggaran belanja daerah. Akan tetapi, pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan dimana rata-rata alokasi belanja modal sekitar 20 persen saja. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah yang berupa rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan, dan rasio kemandirian daerah terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2015-2019. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal yaitu rasio efisiensi keuangan dan rasio kemandirian daerah, sedangkan variabel rasio efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan, rasio, belanja modal.

### Abstract

Capital expenditure is able to bring an impact to economic growth and community welfare, but the management and implementation of capital expenditures in local governments is still not optimal. The central government has set an estimated target of allocation of local government needs at 30 percent of the regional spending budget. However, the local government in East Java Province is still unable to meet the target set where the average allocation of capital expenditure is about 20 percent. Through this research, it is expected to be known the influence of local government financial performance in the form of PAD effectiveness ratio, financial efficiency ratio, and regional independence ratio to capital expenditure allocation in districts / cities of East Java Province during the period 2015-2019. The results of multiple linear regression analysis showed that partially there are two variables that have a significant influence on capital expenditure allocation, namely the ratio of financial efficiency and the ratio of regional independence, while the pad effectiveness ratio variable has no significant effect on capital expenditure allocation.

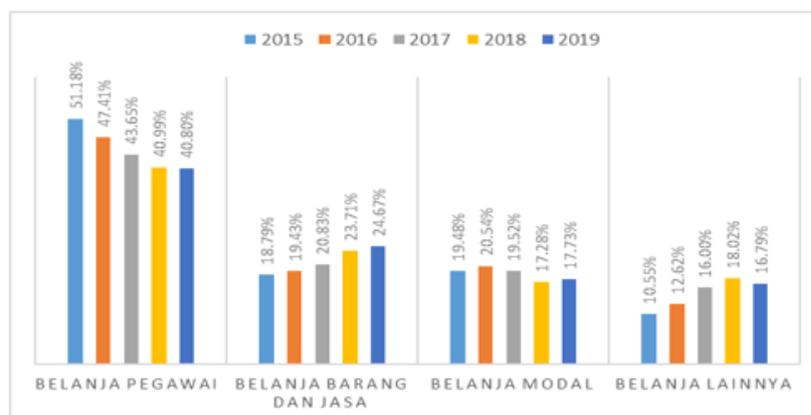
**Keywords:** financial performance, ratio, capital expenditure.

## Pendahuluan

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan otonomi untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri berawal dari tahapan perencanaan pembangunan, sampai pembiayaan. Pernyataan terbukti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut menjelaskan jika Pemerintah Daerah memegang kewenangan untuk menetapkan besarnya alokasi anggaran pada setiap jenis belanja. Pemerintah Daerah seharusnya lebih memfokuskan alokasi anggaran daerah untuk belanja modal agar pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, penyediaan dan peningkatan pelayanan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Belanja modal menjadi komponen penting dalam belanja daerah karena memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan suatu daerah dan akan banyak berkontribusi untuk menggerakkan perekonomian daerah (Praza, 2016).

Belanja modal mampu membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pengelolaan dan pelaksanaan belanja modal pada pemerintah daerah masih belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari alokasi belanja modal yang masih lebih sedikit nominalnya dibandingkan pada alokasi jenis belanja lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah pusat menargetkan kenaikan belanja modal pada pemerintah daerah. Rata-rata belanja modal pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 19,87 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan, sementara pada tahun 2019 rata-rata belanja modal ditargetkan menjadi 30 persen dari total belanja daerah (Bappenas RI, 2015).

Pemerintah Pusat membuat RPJMN yang berarti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 telah menargetkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sebesar 30 persen dari total anggaran belanja daerah. Akan tetapi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan.



Gambar 1.1: Rata-rata *Trend* Belanja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2021

Pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan sebagian besar belanja daerahnya untuk belanja pegawai. Apabila dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa, alokasi belanja modal memiliki porsi yang lebih kecil.

Alokasi belanja modal mampu mencapai 20 persen hanya pada tahun 2016. Dilansir dari ringkasan APBD tahun 2015-2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, belanja modal di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah dan dibawah rata-rata nasional. Oleh sebab itu, belanja modal di Provinsi Jawa Timur perlu ditingkatkan, sehingga bisa berdampak pada meningkatkan pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat.

Pada era otonomi daerah kinerja keuangan perlu untuk dilihat dan diukur karena menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah. Menurut (Mardiasmo, 2018), anggaran mempunyai beberapa peranan penting yakni sebagai alat stabilisasi, alat distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat berguna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rasio efektivitas PAD sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan merupakan aspek yang bisa mempengaruhi alokasi belanja modal (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Rasio efektivitas PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target pendapatan. Realisasi PAD yang dijalankan oleh pemerintah daerah lebih tinggi, dapat digunakan untuk belanja modal. Rasio efisiensi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan pendapatannya untuk belanja daerah (Andriyani et al., 2020). Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan pemanfaatan pendapatan karena jika tidak, pencapaian dalam memenuhi target pendapatan dapat dianggap kurang berhasil (Halim & Kusufi, 2014).

Rasio kemandirian daerah mencerminkan suatu daerah dengan keadaan ekonomi yang diukur oleh besarnya PAD terhadap jumlah pendapatan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) menunjukkan rasio kemandirian daerah mempengaruhi alokasi belanja modal. Di era otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mampu mandiri dalam mengelola keuangannya termasuk dapat memperoleh pendapatan dari sumber daya daerahnya sehingga tidak bergantung pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Ketika PAD mampu mendominasi pendapatan daerah, pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengelola dan memanfaatkan pendapatannya untuk belanja daerah khususnya belanja modal. Besaran alokasi belanja modal memiliki pengaruh pada pembangunan di suatu daerah oleh sebab itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam proses penentuan strategi pengelolaan keuangan sehingga dana daerah dapat dialokasikan secara tepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah rasio efisiensi keuangan memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Belanja Modal**

Belanja modal dapat diartikan sebagai jenis anggaran dimana dikeluarkan yang berguna untuk mendapatkan aset baik itu aset tetap maupun aset lainnya yang bisa memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Penjelasan mengenai belanja modal tersebut ada dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Tanah
- b. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Aset Tetap Lainnya
- f. Belanja yang dialokasikan untuk Aset Lainnya

Menurut PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, anggaran belanja yang digunakan oleh dapat digolongkan sebagai belanja modal apabila memenuhi standar pendanaan dalam rangka perencanaan (pengadaan) maupun pemeliharaan aset yang dimiliki, kriterianya adalah:

- a. Belanja yang dilakukan menimbulkan bertambahnya jumlah aset maupun masa manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.
- b. Belanja yang dilakukan berakibat pada bertambahnya daya tampung, meningkatnya standar kinerja, atau volume aset.
- c. Belanja yang dilakukan mencapai nilai minimum standar pendanaan yakni Rp. 300.000 per unit untuk pengadaan peralatan dan mesin serta Rp. 10.000.000 per paket pekerjaan untuk melakukan pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan yang dimiliki.
- d. Belanja yang dilakukan untuk pengadaan barang tidak dipergunakan untuk diberikan/diperjualbelikan kepada masyarakat umum atau organisasi lain yang berada di luar pemerintah.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Pencapaian realisasi atas program-program kebijakan tergambarkan melalui kinerja suatu entitas atau organisasi, dimana hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi maupun misi organisasi yang tertulis didalam strategi perencanaan suatu organisasi (Mahsun, 2012). Penilaian kinerja ini penting dilakukan pada sebuah organisasi baik sektor swasta ataupun sektor publik.

Metode yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menilai kinerja adalah melalui penilaian kinerja keuangan yang dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan. Akan tetapi pada pemerintah daerah analisis rasio belum banyak dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh (Halim & Kusufi, 2012), pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio pada sektor publik (pemerintah) utamanya APBD, hingga kini belum banyak yang melakukan, sehingga berdampak pada belum tersedianya panduan yang pasti. Meskipun demikian analisis rasio keuangan terhadap APBD tetap diperlukan agar tata kelola keuangan daerah tetap terjaga transparansi, kejujuran, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitasnya.

### **Rasio Efektivitas PAD**

Efektivitas merupakan salah satu standar untuk mengukur keberhasilan dari suatu organisasi atau entitas dalam upaya meraih tujuan yang telah ditargetkan oleh organisasi atau entitas. Kemampuan Pemda (Pemerintah Daerah) dalam mengatur penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan merealisasikan target yang tertera di APBD yang telah disesuaikan dengan potensi sumber daya daerah tergambar pada rasio efektivitas PAD (Praza, 2016). Rasio efektivitas PAD atau Pendapatan Asli Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa hingga sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Ketika penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah atau APBD terhadap target penerimaan PAD semakin besar maka rasio efektivitas pada suatu daerah akan semakin besar atau

sebaliknya. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka dapat dikatakan daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam merealisasikan program kerja untuk melaksanakan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat atau sebaliknya (Andriyani et al., 2020).

### Rasio Efisiensi Keuangan

Efisiensi dan produktivitas merupakan hal yang berkaitan erat. Suatu kegiatan operasional yang sudah dijalankan dapat memenuhi kriteria efisien apabila hasil kerja yang berupa produk, jasa, atau hal lainnya dapat diraih dengan memanfaatkan sumber daya dan dana seminimal mungkin (Mahmudi, 2016). Rasio efisiensi adalah rasio perbandingan realisasi dalam pengeluaran dan penerimaan daerah. Semakin minim hasil dari pengukuran rasio ini, maka akan semakin efisien kinerja keuangan, dan sebaliknya. Sehingga suatu program kerja Pemerintah Daerah dapat dikatakan efisien apabila pelaksanaannya telah mencapai hasil (*output*) yang maksimal dengan biaya (*input*) minimal sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan (Ayu et al., 2019).

### Rasio Kemandirian Daerah

Pengukuran kinerja keuangan dengan rasio kemandirian daerah bisa menjadi gambaran seberapa besar masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan daerah (Delima & Marwa, 2016). Nilai rasio kemandirian daerah yang tinggi mengindikasikan masyarakat daerah setempat memiliki peran yang cukup besar dalam pemasukan daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan. Ketika pemasukan pada suatu daerah besar otomatis PAD memiliki nilai yang besar dan menjadikan suatu daerah semakin mandiri. Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayarkan pajak serta retribusi daerah juga bisa menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat (Halim & Kusufi, 2012). Rasio kemandirian daerah dapat menggambarkan seberapa besar peran masyarakat pada pembangunan daerah, sehingga semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan utama PAD atau Pendapatan Asli Desa. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Halim & Kusufi, 2012).

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Ketika daerah mampu merealisasikan atau bahkan melebihi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan, maka nilai rasio efektivitas pada suatu daerah akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya (Andriyani et al., 2020). Rasio efektivitas PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Realisasi PAD yang melebihi target yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Rahayu, 2019) serta (Gerungan et al., 2015), menunjukkan bahwa efektivitas PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

#### Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Kinerja keuangan dari suatu daerah dikatakan semakin efisien apabila hasil dari pengukuran rasio ini juga semakin kecil dan berlaku sebaliknya. Dengan rasio efisiensi yang bagus pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pendapatannya untuk dialokasikan pada pengeluaran daerah secara maksimal (Andriyani et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani et al., 2020) serta (Irma Novita & Nunung Nurhasanah, 2020) menunjukkan bahwa bahwa rasio efisiensi keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap alokasi belanja modal, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

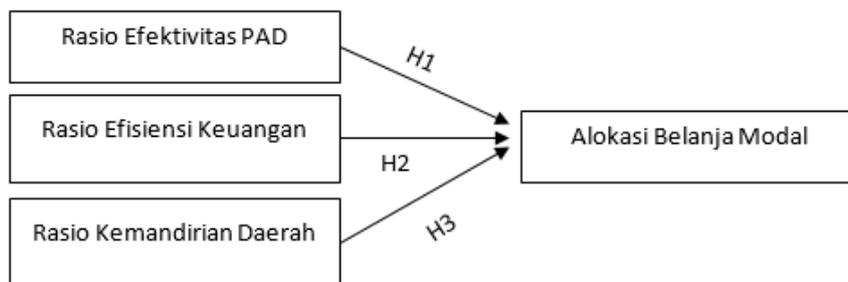
H2: rasio efisiensi keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

### Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Praza, 2016). Dengan tingginya pendapatan daerah diharapkan alokasi belanja modal juga dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Rahayu, 2019), (Liliis, 2018), dan (Suwandi & Tahar, 2016) menunjukkan bahwa bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

### Kerangka Pikir



## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan rincian 29 Pemerintah Kabupaten dan 9 Pemerintah Kota. Sampel pada penelitian ini ditentukan melalui metode purposive sampling. Metode penentuan sampel ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel dengan cara menyeleksi sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriterianya yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur
2. Kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP untuk LKPD-nya pada periode 2015-2019

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 23. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2015 hingga 2019 atau selama 5 tahun, hasil sebanyak 23 dikalikan 5 tahun sehingga didapatkan 115 sampel.

### Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang diukur melalui skala rasio. Variabel tersebut adalah:

- a. Rasio Efektivitas PAD (REPAD) sebagai variabel X1

Rasio ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan target PAD yang telah ditentukan (Halim & Kusufi, 2012).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efisiensi Keuangan (REK) sebagai variabel X2

Rasio ini menunjukkan kegiatan pengelolaan dana daerah dengan cara membandingkan antara pengeluaran yaitu belanja daerah dengan penerimaan yaitu pendapatan daerah (Andriyani et al., 2020).

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- c. Rasio Kemandirian Daerah (RKD) sebagai variabel X3  
Kemandirian daerah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai secara mandiri program pemerintahan, pembangunan daerah, serta penyediaan layanan bagi masyarakatnya (Halim & Kusufi, 2012).

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- d. Alokasi Belanja Modal sebagai variabel Y  
Hasil pengukuran rasio belanja modal bisa diketahui besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan (Andriyani et al., 2020).

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan model penelitian sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Alokasi Belanja Modal
- a : Konstanta
- b1, b2, b3: Koefisien Regresi Variabel Independen
- X1 : Rasio Efektivitas PAD (REPAD)
- X2 : Rasio Efisiensi Keuangan (REK)
- X3 : Rasio Kemandirian Daerah (RKD)
- e : Kesalahan Residual (eror)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

#### Uji Normalitas

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk uji normalitas pada penelitian ini adalah pendekatan statistik non-parametrik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan terdistribusi normal apabila probabilitas (asym. Sig) yang dihasilkan dari uji normalitas bernilai lebih dari 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

N	Kolmogorov-Smirnov	Asym.Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
115	0,060	0,200	Normal

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,060 dengan Asymp. Sig. sebesar 0,200. Probabilitas sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan model regresi linier sudah terdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan Pengujian autokorelasi pada suatu penelitian bisa dijalankan dengan melihat hasil nilai Durbin-Watson pada tabel uji autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan lima persen, sampel (n) sebanyak 115, dan tiga variabel bebas.

**Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.391 <sup>a</sup>	.153	.130	.04529	1.840

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Setelah melihat tabel Durbin-Watson maka didapatkan nilai dL dan dU sebesar 1,6427 dan 1,7496. Merujuk pada hasil uji autokorelasi, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,840. Kriteria suatu data dapat lolos uji autokorelasi adalah ketika nilai  $dU < DW < (4 - dU)$ . Pada penelitian ini nilai kriteria  $dU < DW < (4 - dU)$  telah terpenuhi yakni  $1,7496 < 1,840 < 2,2504$  sehingga model regresi pada penelitian ini dinyatakan telah lolos uji autokorelasi.

### Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terjadi korelasi antar variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik ketika tidak terdapat korelasi diantara variabel bebasnya. Sebuah model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinearitas ketika tolerance bernilai lebih besar dari 0,10 ataupun VIF bernilai kurang dari 10.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)	.954	1.048
REPAD	.996	1.004
1 REK	.954	1.048
RKD	.954	1.048

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF memiliki nilai kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah dan terbebas dari gejala multikolinearitas.

**Uji Heterokedastisitas**

Data yang baik adalah data yang terbebas dari gejala heterokedastisitas. Oleh sebab itu perlu dilakukan uji heterokedastisitas agar dapat diketahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

**Tabel 4. Uji Heterokedastisitas**

Model		Unstand.		Std.	t	Sig.
		Coeff.				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.069	.039		1.784	.077
	REPAD	.017	.015	.104	1.140	.257
	REK	.121	.032	.332	3.737	.056
	RKD	.013	.023	.051	.564	.574

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Sesuai dengan tabel di atas uji yang dilakukan menghasilkan nilai signifikansi dari setiap variabel penelitian >0,05. Oleh sebab itu dapat disimpulkan data yang digunakan sudah terbebas dari gejala heterokedastisitas.

**Estimasi Hasil Regresi Linier Berganda**

Agar diketahui pengaruh variabel bebas yaitu rasio efektivitas PAD (REPAD), rasio efisiensi keuangan (REK), dan rasio kemandirian daerah (RKD) terhadap variabel terikat (dependen) yakni alokasi belanja modal maka dilakukan uji analisis regresi linier berganda

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstand.		Stand.	t	Sig.
		Coeff.				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.025	.063		.398	.691
	REPAD	.038	.024	.140	1.564	.121
	REK	-.149	.053	.246	-1.806	.006
	RKD	.134	.038	.318	3.554	.001

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Berikut ini persamaan model regresi yang disusun menurut hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 6:

$$ABM = 0,025 + 0,038 \text{ REPAD} - 0,149 \text{ REK} + 0,134 \text{ RKD}$$

**Hasil Uji Kecocokan Model (Uji F)**

Tujuan dari Uji F adalah untuk mengetahui kecocokan alat analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini hasil dari analisis Uji F.

Tabel 6. Hasil Uji Kecocokan Model (Uji F)

Keterangan	F	Sig
Regresi	6.691	0.000

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Suatu model regresi dinyatakan cocok atau dapat digunakan apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau probabilitas  $<$  nilai signifikan ( $Sig < 0,05$ ). Dengan  $n = 115$  dan  $k = 4$  maka diperoleh  $F$  tabel sebesar 2,68. Pada tabel 10 diketahui nilai  $F = 6,691$  berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $6,691 > 2,68$ . Kemudian sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa  $Sig = 0,000$ , maka  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka bisa disimpulkan model regresi linier berganda cocok, guna mengetahui pengaruh dari Rasio Efektivitas PAD (REPAD), Rasio Efisiensi Keuangan (REK), dan Rasio Kemandirian Daerah (RKD) terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM).

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Seberapa besar peran variabel bebas mempengaruhi variabel terikat pada sebuah penelitian dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilihat berdasarkan hasil dari nilai Adjusted R<sup>2</sup> pada model regresi yang dibangun. Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui koefisien determinasi (adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 13%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 13% perubahan yang terjadi pada variabel alokasi belanja modal (ABM) dapat dipengaruhi dan dijelaskan secara bersama oleh variabel independen yang digunakan yaitu rasio efektifitas PAD (REPAD), rasio efisiensi keuangan (REK), dan rasio kemandirian daerah (RKD). Sedangkan 87% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian yang dilakukan.

#### Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengujian hipotesis dengan melakukan uji t bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh setiap variabel bebas dalam mempengaruhi atau menerangkan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan significance level ( $\alpha=5\%$ ). Berikut ini kriteria yang mendasari penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian:

1. Hipotesis diterima dengan syarat nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , memiliki arti variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas.
2. Hipotesis ditolak dengan syarat nilai signifikansi  $> 0,05$ , memiliki arti variabel terikat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas.

Tabel 7. Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
REPAD	1,564	0,121	Tidak berpengaruh signifikan
REK	-1,806	0,006	Berpengaruh signifikan
RKD	3,554	0,001	Berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Olahan SPSS

## PEMBAHASAN

Variabel X1 yaitu rasio efektivitas PAD (REPAD) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (ABM) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini berarti keberhasilan pemerintah mencapai target PAD yang telah ditetapkan tidak membawa dampak yang besar pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Rahayu, 2019) dan (Gerungan et al., 2015) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang belum dapat tersampaikan dan diterima dengan tepat mungkin menjadi salah satu sebab terjadinya kondisi tersebut sehingga berakibat pada alokasi belanja modal yang tidak terlaksana dengan efektif. Sementara dana APBD sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai. Pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap jenis dan jumlah kebutuhan yang sebenarnya, baik itu belanja rutin maupun belanja yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik agar alokasi belanja daerah terutama belanja modal bisa terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran.

Variabel X2 yaitu rasio efisiensi keuangan memberi pengaruh signifikan negatif terhadap alokasi belanja modal (ABM) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti ketika angka rasio efisiensi keuangan tinggi, alokasi belanja modal pada suatu daerah menjadi rendah dan begitu pula sebaliknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani et al., 2020) serta (Novita & Nurhasanah, 2020). Pemanfaatan dana daerah yang tidak efisien yang ditunjukkan oleh angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak dialokasikan secara maksimal untuk belanja modal. Hasil tersebut mengindikasikan pemerintah daerah belum menganggap belanja modal sebagai hal penting bagi kemajuan daerah dan memilih untuk mengalokasikan anggaran ke pos belanja lain seperti belanja pegawai (Indiyanti & Rahyuda, 2018).

Variabel X3 yaitu rasio kemandirian daerah (RKD) berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal (ABM) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti semakin besar nilai rasio kemandirian daerah, alokasi belanja modal juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh (Putri & Rahayu, 2019), (Liliis, 2018) serta (Suwandi & Tahar, 2016). Dengan tingginya rasio kemandirian daerah berarti kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya juga meningkat termasuk kegiatan yang dibiayai melalui belanja modal. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Halim dan Kusufi (2012), bahwa rasio kemandirian daerah memberikan ukuran kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan / investasi (belanja modal).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas PAD (REPAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal (ABM), berarti peningkatan atau penurunan efektivitas PAD tidak memberikan perubahan yang signifikan pada alokasi belanja modal.
2. Rasio efisiensi keuangan (REK) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal (ABM), namun pengaruhnya secara negatif yang berarti ketika rasio efisiensi keuangan daerah tinggi alokasi belanja modal pada suatu daerah menjadi rendah dan begitu pula sebaliknya. Hasil

tersebut mengindikasikan pemerintah daerah belum menjadikan belanja modal sebagai prioritas.

3. Rasio kemandirian daerah (RKD) berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal (ABM). Hasil ini mengindikasikan ketika rasio kemandirian daerah tinggi berarti alokasi belanja modal pada suatu daerah juga meningkat.

## SARAN

Saran dari peneliti terkait penelitian ini yaitu:

1. Saran Praktis

Pemerintah diharapkan melakukan identifikasi ulang terkait kebutuhan dan besaran alokasi pada setiap anggaran agar terjadi efektifitas anggaran. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap besarnya alokasi anggaran pada belanja modal karena jenis belanja ini membawa dampak yang cukup besar pada pembangunan dan investasi di daerah yang hasilnya juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2. Saran Teoritis

Untuk penelitian berikutnya, peneliti berharap dapat ditambahkan beberapa variabel independen lain seperti rasio pertumbuhan PAD dan rasio kontribusi BUMD serta memperbanyak sampel penelitian sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat.

## References

- Ayu L, A., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/7792>
- Bappenas RI. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*.
- Delima, N. A., & Marwa, T. (2016). Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://media.neliti.com/media/publications/284114-kinerja-keuangan-daerah-terhadap-belanja-84715778.pdf>
- Gerungan, S. F., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2015). PENGARUH KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL."* <https://doi.org/10.35800/jjs.v6i1.8447>
- Halim, A., & Kusufi, S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Halim, A., & Kususfi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Kee). Jakarta: Salemba Empat.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i09.p04>
- Irma Novita, & Nunung Nurhasanah. (2020). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT PERIODE TAHUN ANGGARAN 2012-2017). *BUANA ILMU*. <https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1050>
- Liliis, M. (2018). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BUDGET RATCHETING TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) | MARLINA | Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v2i2.931>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

**Darmastuti, Susilowati & Tannar**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR**

- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Otonomi Daerah)*. Andi : Yogyakarta
- Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, & Enggar Diah PA. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. In *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3530>
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*. <http://journal.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429>
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *InFestasi*. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran